Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi XI
Minggu ke-5 Mei
(27 Mei s.d. 2 Juni 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERBAIKAN TATA KELOLA DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DALAM MENDONGKRAK PENETRASI ASURANSI DI INDONESIA

Edmira Rivani
Peneliti Madya
edmira.rivani@gmail.com

Isu dan Permasalahan

Penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penetrasi asuransi atau perbandingan polis asuransi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai 3,18 persen pada tahun 2021. Penetrasi tersebut meliputi asuransi jiwa 1,19 persen, asuransi umum 0,47 persen, asuransi sosial 1,45 persen, dan asuransi wajib 0,08 persen. Rendahnya penetrasi asuransi sejalan dengan rendahnya angka densitas atau rata-rata pengeluaran penduduk per tahun untuk asuransi, dimana hanya mencapai US$125 atau Rp1,82 juta per penduduk per tahun. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi masih sangat rendah. Penetrasi serta densitas asuransi di Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan negara Singapura, dengan perbandingan polis asuransi terhadap PDB di atas 8 persen dan rata-rata pengeluaran penduduk per tahun untuk asuransi mencapai US$4.000 per penduduk per tahun.

Transformasi struktural pada industri asuransi diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku industri yang saat ini cukup mengkhawatirkan. Contohnya, dalam industri asuransi jiwa, hingga saat ini masih banyak pemain dengan modal yang sangat lemah. Di sisi lain, para pelaku industri dengan perusahaan multinasional cenderung memiliki modal tak terbatas.

Selain ketimpangan modal antarpelaku industri, secara umum sektor asuransi sebagai industri keuangan nonbank (IKNB) menemui kesulitan untuk meningkatkan penetrasi karena terkendala rendahnya literasi masyarakat akan produk asuransi. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03 persen. Dimana, tingkat literasi asuransi sendiri baru mencapai 19,4 persen. Sementara, indeks inklusi keuangan sebesar 76,19 persen. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab penetrasi industri asuransi terhadap PDB belum berkembang jika dibandingkan beberapa negara lainnya. Literasi yang rendah mengakibatkan asuransi lebih dianggap sebagai produk yang dijual maupun produk yang dipasarkan sehingga asuransi bukan barang yang wajib dimiliki untuk perlindungan di masa depan.

Selain kendala literasi keuangan, langkah perbaikan yang akan dilakukan menjadi kunci peningkatan penetrasi asuransi ke depan. Dalam sejumlah kasus yang terjadi, tata kelola yang buruk dari manajemen perusahaan asuransi yang mengarah pada pelanggaran peraturan yang berlaku telah menciptakan risiko bagi peserta. Tantangan lain untuk meningkatkan penetrasi industri asuransi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Sebagai contoh, tenaga aktuaris di Indonesia terbilang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Padahal, aktuaris memiliki peran penting di industri asuransi dalam mengelola keberlanjutan bisnis dan mendesain produk asuransi yang sesuai dengan profil aset dan liabilitas perusahaan. Masih banyak contoh lain mengenai kurangnya kompetensi SDM dalam industri asuransi, khususnya dalam hal pemasaran produk asuransi. Contohnya, masih ditemukan pemasar produk asuransi yang tidak memahami produk asuransi yang ditawarkan.

Walaupun penetrasi dan densitas rendah, pasar asuransi di Indonesia masih sangat luas dan terbuka untuk dikembangkan lagi. Digitalisasi pada industri asuransi, dapat menjadi solusi untuk melancarkan aliran informasi sekaligus distribusi produk asuransi menuju calon konsumen. Hal ini dapat meningkatkan penetrasi asuransi di pasar Indonesia. Populasi penduduk Indonesia yang mencapai 273,5 juta jiwa pada 2020, serta PDB atas dasar harga berlaku di tahun 2021 yang mencapai Rp16.970,8 triliun, terbesar di Asia Tenggara, menggambarkan bahwa ruang akselerasi pasar asuransi di Indonesia masih sangat terbuka. Peningkatan penetrasi asuransi dibutuhkan untuk mendorong pendalaman di pasar keuangan. Ini penting bagi stabilitas sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun-tahun yang akan datang.

Atensi DPR

Dibutuhkan kolaborasi DPR RI khususnya Komisi XI, Pemerintah, otoritas pengawas, asosiasi, perusahaan asuransi, dan konsumen untuk menjawab permasalahan dalam industri asuransi. Kolaborasi harus fokus untuk menguatkan regulasi, meningkatkan pengawasan, dan tata kelola yang baik. Tentu saja peningkatan kompetensi SDM, pengentasan ketimpangan antara pelaku industri, dan digitalisasi perlu diperhatikan, agar menjadi solusi untuk mengatasi persoalan yang selama ini menggerogoti sektor asuransi. Sementara untuk publik, peningkatan literasi asuransi menjadi hal yang sangat penting.

Kolaborasi tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik pada industri asuransi dan meningkatkan penetrasi industri. Hal ini harus dilakukan melalui inisiatif yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perlu kita sadari, reformasi sektor keuangan bukan hanya tugas DPR RI dan pemerintah saja, tetapi merupakan agenda yang penting bagi keseluruhan industri itu sendiri dan masyarakat.

Sumber

Bisnis Indonesia, 31 Mei 2022;
Kompas, 31 Mei 2022;
Media Indonesia, 31 Mei 2022;
tempo.co, 31 Mei 2022.

Minggu ke-5 Mei
(27 Mei s.d. 2 Juni 2022)

2022

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Sulasi Rongiyati
Izzaty

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022